

**PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN GELANDANG
PENGEMIS (GEPENG) OLEH DINAS SOSIAL DENGAN SATPOL PP DI
KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
(Oleh : DITASMAN)
(Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si)**

ABSTRAK

Implementation Coordination Control Beggars Midfielders (sprawl) By
Social Agency with municipal police in the city of Pekanbaru Year 2011

This study aims to look at how the Coordination of Social Services With On Control Midfielder municipal police Beggars (Gepeng) In the city of Pekanbaru. In line with the above objectives, the informants in this study were Social Service officials, municipal police officers who interviewed the author directly.

Types and sources of data in this study is primary data collected from interviews in the study site, and secondary data obtained through libraries and institutions associated with this study.

Data collection techniques in this study was the observation, interview. While the data analysis techniques, namely the classification of data in the form of the group and the type and make deskripsi or interpretation of the findings of a qualitative study.

Once the data is analyzed then proceed with making the conclusion of the study, while the conclusions from the results of Case Studies Social Service Coordination with municipal police About Fostering Homeless and Beggars in the city of Pekanbaru is the implementation problems of coordination, communication, coordination, functions and structure of the bureaucracy Social Service and municipal police the horizontal and not fully understand the importance of good coordination with the task in the handling of vagrants and beggars in the city of pekanbaru.

Keywords: Coordination, Gepeng, Social Services and the municipal police

PENDAHULUAN

Gepeng yang merupakan singkatan dari gelandangan pengemis merupakan seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. pengertian ini terkait dengan masyarakat miskin dari kalangan pendatang. Hal ini dikarenakan masyarakat pendatang lebih cenderung tidak langsung dapat beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu hal ini menyebabkan masyarakat pendatang cenderung untuk memilih pekerjaan menjadi gepeng. Dari data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana gepeng berasal dari daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Palembang dan Jambi. Hal ini didasarkan pada daerah pemulangan bagi gepeng yang terjaring razia.

Tabel 1.1
Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terjaring Razia di Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah yang Terjaring	Dipulangkan ke Daerah Asal	Penduduk Tempatan	Keterangan
1	2007	134 orang	112 orang	22 orang	Populasi gepeng tahun 2007 s/d 2011 berjumlah 936 orang, 30 diantaranya terjaring beberapa kali
2	2008	119 orang	58 orang	61 orang	
3	2009	106 orang	60 orang	46 orang	
4	2010	78 orang	50 orang	33 orang	
5	2011	83 orang	50 orang	31 orang	

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2012

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah gepeng yang terjaring di Kota Pekanbaru tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebanyak 520 orang dimana dalam penjaringan tersebut terdapat 30 orang yang terjaring beberapa kali. Dari razia yang dilakukan terhadap gepeng di Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa jumlah yang terjaring razia mengalami penurunan untuk tahun 2007 hingga tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011. Dari razia yang dilakukan dilakukan pemulangan ke daerah asal penduduk gepeng tersebut. Adapun daerah pemulangan gepeng tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Palembang dan Jambi.

Kemudahan mencari nafkah dengan melakukan aktivitas mengemis dapat membuat masyarakat miskin lainnya untuk meniru aktivitas tersebut. Maraknya para gepeng umumnya dijumpai di pusat-pusat keramaian seperti di jembatan penyebrangan, di persimpangan lampu merah, pusat perbelanjaan. Untuk Kota Pekanbaru kita dapat melihat kehadiran gepeng pada persimpangan lampu merah di samping Mall SKA, jembatan penyebrangan Plaza Sukaramai, pasar Cik Puan. Jumlah gepeng ini akan mengalami penambahan yang signifikan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kehadiran para gepeng yang mengganggu ketertiban sosial merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bermunculan dan maraknya gepeng di Kota Pekanbaru membuat pemerintah Kota Pekanbaru kesulitan

untuk mewujudkan slogan yang telah ditetapkan. Adapun slogan Kota pekanbaru yang dikenal dengan "kotaku, kotamu dan kota kita bertuah", mempunyai motto: bersih, tertib, usaha bersama, aman, dan harmonis dengan arti:

1. Bersih
Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat iburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.
2. Tertib
Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Usaha Bersama
Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
4. Aman
Rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.
5. Harmonis
Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Setukul bagai palu, Seciap bagai ayam, Sedencing bagai besi, Yang tua dihormati, Yang muda dikasihi, Yang cerdik pandai dihargai Yang memerintah ditaati.

Motto ini ingin mewujudkan kota Pekanbaru yang bersih, tertib, usaha bersama, aman, dan harmonis harus didukung dengan penegasan pemerintah Kota Pekanbaru. Penegasan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi dan menghilangkan gepeng di Kota Pekanbaru..

Untuk mengantisipasi menjamurnya gepeng di Kota Pekanbaru maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun tujuan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah untuk meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial. Sasaran dari dari Perda No. 12 Tahun 2008 ini adalah terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tenang.

Pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial dan Pemakan pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan juga keputusan kepala dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru nomor : 270D/462.2-REHSOS/2012, tentang penunjukan anggota tim penanggulangan gelandangan dan pengemis kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial tahun 2012 di kota pekanbaru. Berikut uraian tugas masing-masing tim razia/ penanggulangan/ pemantauan gelandang dan pengemis di kota pekanbaru tahun 2012 :

Tabel 1.2
Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Penanggulangan
Pemantauan Gelandang Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Jabatan dalam struktural	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman	Pembina	Bertanggung jawab dalam memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemantauan Gepeng
2	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab penuh atas kegiatan penanggulangan Gepeng di kota Pekanbaru
3	Kabid Rehabilitasi Sosial	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan gepeng di kota Pekanbaru
4	Kabid Bina Mitra Polresta Pekanbaru	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana serta mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan kegiatan razian gepeng di kota pekanbaru
5	Kabid Pemberdayaan dan Pelayanan sosial	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab meberikan bimbingan sosial dan motivasi terhadap klien dan mengkoordinir melaksanakan penetiban dilapangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
6	Kabid Pemakaman	Wakil Ketua III	Bertanggung jawab melaksanakan identifikasi terhadap gepeng yang terjaring dalam razia dan dibawa kepenampungan serta pemulangan gepeng kedaerah asal bagi gepeng dari daerah luar dan pemanggilan terhadap keluarga anak jalan yang terjaring dan ditampung ditempat penampungan
7	Kasi RTS	Sekretaris	Melaksanakan administrasi kegiatan penanggulangan gepeng di kota pekanbaru sekaligus membuat laporan

umber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2012

Tabel 1.3
Uraian Tugas Satpol PP Penanggulangan Pemantauan Gelandang Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Jabatan dalam struktural	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	KasatPol PP	Koordinasi Pemantauan	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan razia dan pemantauan di daerah rawan gepeng serta melaporkan kepada yang berwenang dalam melaksanakan razia.
2	Staf Bidang Rehsos	Koordinator lapangan/ Posko	Bertanggung jawab serta mengkoordinir anggota dalam melaksanakan kegiatan penjagaan di pos titik rawan gepeng dalam hal penertiban gepeng
3	Polresta Pekanbaru, Satpol PP & Dinsos	Anggota	Melaksanakan penjagaan dan pemantauan serta penertiban pada titik rawan gepeng di kota pekanbaru
4	Staf Sekretaris	Koordinator Identifikasi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan identifikasi dan surat pernyataan gepeng yang terjaring hasil penjaringan, menyiapkan berita acara bagi mereka yang akan dipulangkan serta membuat dokumentasi hasil kegiatan razia
5	Polresta Pekanbaru, Satpol PP & Dinsos	Anggota	Membantu pelaksanaan identifikasi hasil razia penjaringan kegiatan razia dan penanggulangan gepeng serta membuat dokumentasi kegiatan dimaksud
6	Polresta Pekanbaru, Satpol PP & Dinsos	Petugas Razia Dan Pemantauan	Melaksanakan razia/ penjaringan dan pemantauan terhadap gepeng yang beroperasi di jalan protokol, persimpangan jalan dan lampu merah, jembatan penyebrangan dan tempat-tempat fasilitas umum di kota pekanbaru

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2012

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan koordinasi penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap penyandang masalah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru antara Dinas Sosial dengan Satpol PP tentang penertiban gelandang pengemis (gepeng) di kota pekanbaru harus bekerja sama dalam penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap gepeng.

Fenomena yang terjadi belum berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai. Padahal jika ketertiban terlaksana maka pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram. Adapun hal-hal yang membuat tidak terlaksananya dengan baik adalah kurangnya pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pentingnya tidak membiarkan kegiatan gepeng di Kota Pekanbaru. Maraknya gepeng juga terjadi akibat masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat

mendukung kegiatan gepeng yang berkeliaran melakukan usaha-usaha yang dapat merusak ketertiban sosial. Usaha-usaha ini adalah mata pencaharian yang dilakukan oleh gepeng tersebut seperti megemis, mengamen, mengelap mobil ketika lampu merah. Masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting dalam usaha-usaha ketertiban sosial harus mengetahui kedudukan dan fungsinya di dalam Perda No. 12 Tahun 2008 dan Keputusan Dinas Sosial. Masyarakat yang merasa kasihan dengan gepeng cenderung memilih memberikan sebagian uangnya untuk gepeng.

Fenomena yang terlihat di Kota Pekanbaru menyangkut keterlibatan masyarakat dalam pelestarian gepeng adalah terdapat masyarakat yang memberikan uang receh ataupun uang kecil kepada peminta-peminta. Hal ini dapat dilihat pada jembatan penyeberangan di depan Pasar Ramayana Jl. Sudirman dan pada saat lampu merah di depan Mall SKA. Dari tindakan yang dilakukan beberapa oknum masyarakat terhadap gepeng menandakan bahwa tugas Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penganggulangan gepeng di kota pekan baru belum terimplementasi dengan baik.

Kemudian kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penganggulangan gepeng dan tidak sesuai dengan keputusan kepala dinas sosial dan pemekaman kota pekanbaru nomor : 270D/462.2-REHSOS/2012, tentang penunjukan anggota tim penanggulangan gelandangan dan pengemis kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial tahun 2012 di kota Pekanbaru dengan terbuktinya masih banyak saja gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum di kota pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang penulis utarakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan gepeng di Kota Pekanbaru dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN GELANDANG PENGEMIS (GEPENG) OLEH DINAS SOSIAL DENGAN SATPOL PP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011.**

Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan koordinasi, baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan program program pembangunan. Agar pelaksanaan koordinasi dan pembangunan berjalan dengan baik, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan aturan main dalam pelaksanaan koordinasi dimaksud.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah penelitian ini adalah **"Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Oleh Dinas Sosial Dengan Satpol PP Tentang Penertiban Gelandang Pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru"**

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Dengan Satpol PP dalam permasalahan Gepeng di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penganggulangan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu administrasi Negara umumnya dan koordinasi pelaksanaan tugas pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya.
4. Sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan koordinasi di Dinas Sosial dan Pemakan dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Konsep Teori

Menurut Leonardo D. White dalam Sutarto (2000; 141), koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan.

Dari pengertian di atas dikatakan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha adanya penyesuaian dari unit-unit yang ada dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sehingga tercapainya tujuan akhir dengan hasil yang baik, hal ini akan terwujud jika adanya usaha yang baik dari bawahan dengan disertai dukungan oleh atasan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1985; 110) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Selanjutnya Soewarno Handyaningrat (1990; 88) : "Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha-usaha secara maksimal agar diperoleh hasil keseluruhan".

Kemudian Soenyoto Rais (1994; 34) koordinasi yang merupakan suatu usaha penyalarsan yang dilakukan oleh menejer atau administrator antara tugas yang dilakukan oleh tiap-tiap unit yang ada dalam suatu organisasi sehingga diharapkan tidak terjadinya kesimpangsiuran antara tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan terjadinya double pekerjaan.

Berdasarkan hubungan antara yang mengkoordinir dengan yang dikoordinir menurut Soewono Handyaningrat dalam Moekijat (1994; 32) ada beberapa jenis koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi intern, koordnasi yang terdiri dari koordinasi vertical (struktural), koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal

- Koordinasi vertical yaitu dimana antara yang mengoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara structural terdapat hubungan hirarkis, hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando
 - Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional yaitu kedudukan antara yang mengkoordinir dan yang dikoordinir setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya sehingga perlu dilakukan koordinasi
 - Koordinasi diagonal yaitu koordinasi dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi tetapi satu dan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.
- b. Koordinasi ekstern, Yaitu koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar organisasi yang terdiri dari koordinasi horizontal dan diagonal. Menurut George Terry dalam Moekiiat (1994; 27) koordinasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang ada dalam organisasi koordinasi dipandang sebagai bantuan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Sehingga koordinasi adalah suatu proses yang mengatur kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan waktu, tempat, sehingga masing-masing fungsi manajemen tersebut sesuai. Dengan demikian melalui koordinasi yang baik maka pemerintah dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan pembangunan akan lebih terjamin pelaksanaannya. Karena koordinasi yang baik akan memberikan efisiensi yang secara langsung akan mengurangi pemborosan biaya, tenaga dan alat yang digunakan.

Koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengadakan pertemuan antar koordinasi antar pejabat.
- b. Mengadakan pertemuan formal antar pejabat yang disebut rapat
- c. Membuat edaran berantai kepada pejabat yang di perlukan
- d. Menyebarkan kartu nama pejabat yang memerlukan
- e. Mengangkat koordinator
- f. Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tata kerja dan kumpulan peraturan
- g. Berhubungan melauai alat perhubungan
- h. Memuat tanda, symbol, kode dan lain-lain (Sutarto, 1992 : 136-141)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian, untuk kemudian dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada. Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke", namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto,86:5)..

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satpol PP di Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di kantor ini merupakan Lokasi penelitian memiliki semua data yang sangat diperlukan dari hasil penyelesaian permasalahan.

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui key person dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. Key person ini adalah tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh formal yaitu kepala kantor, sedangkan tokoh informal yaitu tokoh masyarakat yang memahami tentang objek penelitian.

Tabel 1.4. Informan Penelitian.

No	Key Informan	Nama Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	Dra. Hj. Husnimar	1
2	Sekretaris Dinas Sosial	Dra. Yusri	1
3	Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial	Heryani, SST	1
4	KaSatpol PP	Drs. Baharuddin	1
5	Seksi Operasional	Iwan.S, S.Sos, M.si	1
6	Sub. TU Satpol PP	Budi Mulia. SH	1
7	Anggota Satpol PP	Ando	1
Jumlah			7

Sumber : Data Tahun 2012

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi.

- a. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para responden berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini, secara mendalam dan kualitatif dengan informan yang bersangkutan dan yang tepat memberikan informasi..
- b. Studi Pustaka
Penulis didalam memperoleh informasi juga menggunakan buku-buku literatur dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian
- c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara dokumentasi foto.

Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjalankan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam satu model sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Koordinasi Dinas Sosial dengan SATPOL PP

A.1. Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu perencanaan yang diproyeksikan dalam suatu tindakan. Sedangkan langkah-langkah perencanaan adalah : Adanya penyusunan rencana dan program kerja, Adanya tujuan rencana kerja, Adanya penetapan sasaran rencana kerja.

A.2. Komunikasi

Komunikasi adalah sebagai suatu informasi atau pesan melalui saluransaluran yang disusun dari pada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Adapun komunikasi dilakukan dengan tiga cara : Adanya pertemuanl rapat antar pegawai, Adanya komunikasi tidak langsung, Adanya perhatian pimpinan

A.3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan antara lain Perincian tugas, Pengadaan dan penempatan pegawai, Kewajiban dan tanggung jawab Agar terdapat efisiensi daiam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait.

A.4. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan apa yang harus dikerjakan agar sesuai dengan apa yang direncanakan, disamping untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dan berusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Adapun proses dari pada pengawasan adalah sebagai berikut : Pemberian laporan-laporan dari tugas yang dilaksanakan, Pengawasan langsung ke lapangan oleh atasan, adanya sanksi yang tegas dari atasan bagi petugas yang melakukan penyimpangan.

Permasalahan muncul dan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis merupakan permasalahan yang sering terjadi secara menyeluruh hampir di seluruh kota besar di Indonesia, tanpa terkecuali Kota Pekanbaru. Permasalahan ini muncul dan terjadi bukan hanya sekali namun berulang-ulang, Hampir setiap hari kita temui gelandangan dan pengemis menghiasi wajah Kota Pekanbaru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, yaitu faktor kemiskinan, faktor sikap mental gelandangan dan pengemis, pelanggaran hukum bagi gelandangan dan pengemis serta kebiasaan masyarakat untuk memberi sumbangan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sosial, Dra. Yusri :

"....Masalah utamanya adalah kemiskinan dan kebiasaan kita memberi. Sebenarnya jumlah uang yang kita beri bukanlah banyak, tapi mekanismenya yang ingin kita didik. Dari tugas Dinas Sosial telah melakukan upaya pembinaan kepada GEPENG yang telah kita bina, "(Dra. Yusri, wawancara 15 Oktober 2012)...."

Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis muncul diakibatkan oleh tekanan ekonomi yang semakin sulit. Kehidupan sosial gelandangan dan pengemis yang begitu miskin dan tanpa keahlian serta modal menuntut mereka harus bersaing untuk mendapatkan penghasilan. Masalah ekonomi muncul dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda di antara yang satu dengan daerah yang lain.

Unsur Pelaksana Untuk Penertiban & Pembinaan GEPENG

Unsur pelaksana dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru terdiri dari Dinas Sosial dan Perumahan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian.

Unsur pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan karena unsur pelaksana merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Dimana pembinaan gelandangan dan pengemis ini dapat berjalan jika didukung oleh unsur pelaksana itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melihat bagaimana unsur pelaksana itu dapat dilihat dari lembaga pelaksana dan birokrasi yang

berlaku. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang unsur pelaksana:

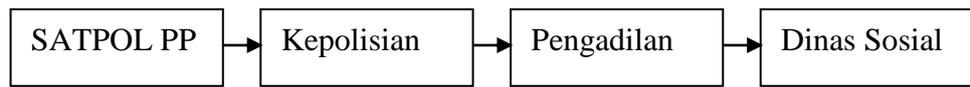
"...Unsur pelaksananya itu adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang utama dilimpahkan kebawah. Memang ada beberapa instansi yang terlibat, itu idealnya, tetapi disinikan yang aktif Dinas Sosial. Dan karena memang kita masih sosialisasi, sosialisasi dan terus sosialisasi. Untuk koordinasi dengan instansi, perusahaan dan kepolisian masih baru berjalan. Untuk menerapkan sanksi-sanksi pengadilan itu sekarang masih dalam bentuk sosialisasi. Dan diharapkan memang paling tidak untuk mengerjakan fungsi masing-masing. Kalau Satpol PP bertugas sebagai pengamanan, Dinas Sosial untuk pembinaan. Kemudian sama-sama diinapkan beberapa hari disuatu tempat, diberikan pengarahan. Diberitahukan juga bahwa buat mereka itu ada sanksinya. Selain melanggar ketertiban juga melanggar dasar hukum KUHP Pasal 504 dan KUHP Pasal 505. Kemarin kami sudah ke SATPOL PP dan Kepolisian, mereka juga sudah tahu betul tentang Perda tentang koordinasi tentang penanganan GEPENG." (Heryani SST, Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, wawancara 17 Oktober 2012)...."

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana yang ada belum maksimal koordinasi dalam penanganan masalah GEPENG. Ini terlihat dari belurn berjalannya fungsi masing-masing lembaga pelaksana yang terlibat dalam penanganan masalah GEPENG. Dalam Peraturan Daerah No.12 tahun 2008 sebenarnya telah jelas bagaimana tugas dan fungsi masing-masing pihak yang merupakan unsur pelaksana masih dalam proses sosialisasi. Dan ini berimbas pada koordinasi masing-masing lembaga yang sarnpai saat ini masih belum berjalan maksimal. Sedangkan birokrasi yang berlaku adalah birokrasi yang mengandung prinsip kesejajaran. Hal ini berdasarkan penuturan dari ibu Heryani SST, Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berikut adalah kutipan wawancara terkait dengan birokrasi yang berlaku dalam proses pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru:

"....Prinsip birokrasi yang berlaku tidak saling membawahi tapi kesejajaran. Kalau dalam strukturnya itu digambarkan dengan garis horizontal antara Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian dan Pengadilan. Kalau dibaca dari Perda, Satpol PP sebagai penegak hukum itu menangkap (razia) gepeng, kemudian kepolisian memproses secara hukum, diserahkan ke Pengadilan untuk tindak pidana ringan, nanti ditentukan hukuman/ sanksinya apa. Baru setelah mereka menjalani sanksi itu, diserahkan ke Dinsos untuk diberikan pembinaan. Pembinaan ini mereka diberikan keterampilan atau binaan mental atau dipulangkan ke daerah asal." (Heryani SST, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dim Pemakaman Kola Pekanbaru, wawancara 17 Oktober 2012)

Idealnya proses pembinaan gelandangan dan pengemis adalah seperti yang dijelaskan di atas. Jika digarnbarkan dalam bentuk bagan, maka garis koordinasi yang ada akan terlihat seperti bagan di bawah ini:

Gambar 3.1. Bagan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Gepeng



Sumber : Data Tahun 2012

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Dinas Sosial Dengan Satpol PP Tentang Penertiban Gelandang Pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru, maka kesimpulan yang diambil adalah:

1. Studi Kasus Koordinasi Dinas Sosial Dengan Satpol PP Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota pekanbaru adalah masalah Pelaksanaan koordinasi, komunikasi koordinasi, tugas fungsi dan struktur birokrasi yang Dinas Sosial dan Satpol PP secara horisontal dan belum sepenuhnya memahami pentingnya koordinasi dengan baik dalam melakukan tugas dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.
2. Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dinilai baik. Hal ini dilihat dari unsur unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran yang telah dapat disinergikan sehingga tujuan dan sasaran dari pembinaan untuk dapat dicapai, kendatipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Koordinasi Dinas Sosial Dengan Satpol PP Tentang Penertiban Gelandang Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Koordinasi Dinas Sosial Dengan Satpol PP Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota pekanbaru harus sering melakukan komunikasi koordinasi agar tugas fungsi dan struktur birokrasi yang ada di Dinas Sosial dan Satpol PP dapat sepenuhnya memahami tugas masing-masing dan tidak ada lagi masing-masing lembaga pemerintah kota pekanbaru ini merasa memiliki jalan tugas sendiri-sendiri karena pentingnya koordinasi dengan baik dalam melakukan tugas dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru agar bersama-sama dapat memimplementasikan agar tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marpuji, dkk., 1990. *Gelandangan di Kertasura*, dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Badan Pusat Statistik Kota, *Pekanbaru dalam Angka, 2011*. Pekanbaru
- Bintoro., 1981, *Efektifitas Organisasi*, Bina Angkasa, Jakarta.
- Dann Suganda., 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia*, Jakarta.
- Didiet Hardjito., 1995, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, Raja Grafindi Persada, Jakarta
- Dann Suganda., 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta.
- Damanik, A.R., 1987, *Koordinasi Instansi Terkait da/am Pembangunan PIR Khusus dan Pelayanan terhadap Calon Petani Pewserta di Propinsi Tingkat I Riau*, Pekanbaru.
- Dhanna S. S 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gibson, Ivanecevich, Donnelly, Agus Dharma., 1995, *Organisasi, Prilaku, Struktur dan Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang., 1987, *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*, cetakan kedua, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu –ilmu sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Lexy Moeleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung
- Riant Nugroho, 2011. *Public Policy*, Elex Media Komputindo. Jakarta
- Peraturan Daerah Kota No. 12 Tahun 2008 tentang *Ketertiban Sosial*. Pekanbaru
- Riwu Kaho, Josef, Drs, MPA, 1983 *Fungsi-Fungsi Pemerintahan* ; Badan Diklat Depdagri;.
- Soeharno Handyaningrat, 1985 *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen dokumen*, Gunung Agung, Jakarta,
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan pembangunan sistem informasi*. Yogyakarta: penerbit Andi.

DAFTAR WEB

- <http://www.google.co.id/>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>